

## **Komunikasi Organisasi Dalam Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Di Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe**

*John Calvin Masipuang<sup>1</sup>*

*Sarah Sambiran<sup>2</sup>*

*Agustinus B Pati<sup>3</sup>*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Pelaksanaan Komunikasi Organisasi di Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe Dalam Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan. Dalam sebuah organisasi, komunikasi memegang peranan yang sangat penting karena komunikasi merupakan penggerak organisasi dimana tujuan organisasi mustahil atau sulit dicapai tanpa adanya komunikasi. Organisasi terbentuk karena adanya kesamaan tujuan yang dimiliki tiap anggota. Adapun Camat dalam menyelenggarakan kewenangan atributifnya mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan umum, mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah lainnya di Kecamatan serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya Pemerintahan Desa dan kegiatan Kelurahan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data melalui proses observasi, wawancara mendalam dan studi kepustakaan atau dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Di kecamatan tabukan selatan menggunakan berbagai media untuk berkomunikasi dan menyampaikan informasi seperti pertemuan langsung seperti rapat, apel dan juga melalui telepnn dan media internet berbasis aplikasi. komunikasi juga dapat tersampaikan melalui aturan yang berlaku, dengan adanya aturan, maka pegawai telah mengetahui apa yang harus dikerjakan seperti yang terjadi di kecamatan tabukan selatan dimana pegawai berpedoman pada peraturan pemerintah, SOP dan juga perintah tertulis oleh atasan.

***Kata Kunci: : Komunikasi, Organisasi, Kecamatan***

<sup>1</sup> *Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat*

<sup>2</sup> *Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat*

<sup>3</sup> *Dosen Program Studi Ilmu Politik FISPOL-Unsrat*

*Sekretariat:*

*Gedung c, Lantai 2, Fispol Unsrat  
Jl. Kampus Bahu Unsrat Manado*

## Pendahuluan

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan artinya dengan adanya Kecamatan, Camat sebagai pimpinan tertinggi di Kecamatan harus dapat mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan di Kecamatan, kemudian juga Camat harus memberikan pelayanan publik di Kecamatan serta pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan.

Dilihat dari uraian tugasnya, Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki banyak tugas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan juga organisasi lain seperti kepolisian, TNI, Dinas, Badan dan juga Desa-desa, dalam pelaksanaan tugasnya dibutuhkan kekompakan anatar bawahan dan pimpinan dalam organisasi tersebut.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dari kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sangihe, telah ada peraturan daerah mengenai organisasi dari kecamatan yakni Perda Nomor 73 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Pada Bab V pasal 15 disebutkan Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing - masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing - masing. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing - masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah - langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing - masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan

bertanggungjawab kepada atasannya masing - masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Dari hasil pengamatan sementara peneliti dilapangan terlihat masih adanya kekurangan dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe, terlihat beberapa pegawai masih kebingungan dalam bekerja, kurang memahami tugas pokok dan fungsinya, informasi (perintah) yang diberikan dari pimpinan kepada bawahan belum berjalan sebagaimana mestinya, masih adanya ketidakberaturan berkas, masih seringnya kesalahpahaman antara sesama pegawai salah paham dalam bekerja dan juga pernah berujung pada percekocokan yang dilihat oleh masyarakat, dari masalah tersebut terlihat bahwa fungsi komunikasi dalam organisasi di Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe belum berjalan secara optimal dan dibutuhkan kemampuan seorang pemimpin untuk menyelesaikan hal tersebut.

Permasalahan komunikasi yang terjadi dalam organisasi Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe dilaksanakan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan yakni menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan penrdang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum.

Pada observasi awal peneliti terkadang masih terdapat masalah komunikasi internal antara camat dengan bawahannya misalnya penandatanganan sebuah surat yang seharusnya ditandatangani oleh camat namun karena kurangnya komunikasi, maka seccam langsung mengambil alih tanpa mengkomunikasikannya terlebih dahulu, begitu juga dengan bawahan lainnya seperti kepala-kepala seksi dan para staf, dimana *miss* komunikasi masih sering terjadi, biasanya terjadi pada saat camat memberikan perintah namun tidak dilaksanakan sesuai arahan seperti pembuatan surat menyurat yang terkadang isinya kurang sesuai dengan arahan camat. Selain terkadang camat mendelegasikan seccam ataupun kepala seksi

untuk mewakili dalam sebuah acara dan dalam memberikan sambutan mewakili camat, informasi yang diberikan tidak sepenuhnya disampaikan oleh bawahannya kepada masyarakat.

Kemudian juga sering kali para kepala seksi dan parah pegawai tidak melaporkan hasil pekerjaan yang di lakukan baik secara lisan maupun tulisan, sehingga pimpinan dalam hal ini camat merasa tidak senang dengan kinerja dari para kepala seksi dan pegawai lainnya yang tidak membuat laporan baik secara lisan maupun tulisan, seringkali juga camat memberikan perintah tanpa memberi penjelasan, langkah-langkah sistematis dalam pelaksanaan pekerjaan yang ada. Sehingga menimbulkan kebingungan para pegawai dalam melaksanakan perintah tersebut, oleh karena itu menjadi menarik dari parah peneliti untuk menggaji tentang komunikasi internal dalam pemerintah kecamatan, sehingga tugas-tugas pemerintah dapat berjalan dengan sesuai aturan dan tujuan yang di harapkan.

## Metode Penelitian

Metode penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif. Fokus dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan Komunikasi Organisasi pada Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dengan menggunakan teori Sendjaja (2002:45), mengenai fungsi komunikasi dalam organisasi dan dalam penelitian ini menggunakan 3 fungsi komunikasi yakni sebagai berikut:

- Fungsi Informatif
- Fungsi Regulasif
- Fungsi Integratif

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan "*Social situation*" atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu : tempat (*Place*), Pelaku (*Actors*), dan aktivitas (*Activity*) yang berinteraksi secara sinergis. Situasi sosial tersebut, informan dapat berada dirumah Bersama keluarga dan aktivitasnya, atau orang-orang disudut-sudut jalan yang sedang ngobrol, atau di tempat kerja, di kota, desa atau wilayah suatu

Negara. (Sugiyono 2010:298) Oleh sebab itu informan yang di maksud dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan
3. 2 Kepala Seksi
4. 2 Staf

Teknik Pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi kepustakaan.

Untuk menganalisa berbagai fenomena di lapangan, langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut: Pengumpulan informasi melalui wawancara, observasi langsung dan dokumentasi; Reduksi data Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, dan Penyajian data Setelah data direduksi

## Pembahasan

### 1. Fungsi Informatif

Salah satu fungsi komunikasi organisasi adalah berfungsi sebagai informatif yakni dimana berbagai macam informasi terkait tugas pokok dan fungsi organisasi tersebut, termasuk kecamatan tabukan selatan. Dari hasil wawancara terlihat bahwa semua kebijakan dan program dikomunikasikan dan diinformasikan kepada pihak terkait, bukan hanya pada lingkungan maupun lingkungan eksternal juga.

Dalam sebuah organisasi, tentunya tidak pernah terlepas dengan yang namanya komunikasi. Komunikasi merupakan suatu proses pertukaran ide-ide, sikap, emosi, gagasan, informasi, pendapat, lambang-lambang, simbol, maupun instruksi antara individu atau kelompok yang bertujuan untuk menciptakan sesuatu, memahami dan mengkoordinasikan suatu aktivitas. Dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi adalah sistem yang mengatur pengiriman pesan untuk ditanggapi oleh pihak penerima, karena itu proses transmisi dari sebagian informasi atau pesan yang berasal dari sumber itu harus dirancang secara menarik, sehingga dapat mencapai tujuan akhir komunikasi.

Katz & Kahn dalam (Pace and Faules, 2006: 185) menyatakan bahwa ada lima jenis

# EKSEKUTIF

Volume 2 No. 4 Tahun 2022

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

informasi yang biasa dikomunikasikan dari atasan kepada bawahan, yaitu:

- a) Informasi mengenai bagaimana melakukan pekerjaan,
- b) Informasi mengenai dasar pemikiran untuk melakukan pekerjaan,
- c) Informasi mengenai kebijakan dan praktik-praktik organisasi,
- d) Informasi mengenai kinerja pegawai, dan
- e) Informasi untuk mengembangkan rasa memiliki tugas (sense of mission).

Dalam hal penelitian ini juga, pegawai di seluruh tingkatan organisasi kecamatan merasa perlu diberikan informasi. Manajemen puncak hidup dalam dunia informasi. Kualitas dan kuantitas informasi harus tinggi agar dapat membuat keputusan yang bermanfaat dan cermat. Manajemen puncak pun harus memiliki informasi lebih darisemua unit dalam organisasi tersebut, dan harus memperoleh informasi untuk semua unit. Aliran informasi dari manajemen puncak yang turun ke tingkatan operatif merupakan aktivitas yang berkesinambungan dan sulit. Pemilihan cara menyediakan informasi mencakup tidak hanya pengeluaran sumber daya langsung moneter tetapi juga sumber daya psikis dan emosional.

Dalam sebuah organisasi terutama organisasi publik, pembagian informasi itu menjadi sebuah keharusan baik antara atasan dan bawahan, bawahan dan bawahan bahkan dengan masyarakat. Dalam lampiran Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2011, tentang Pedoman Umum Komunikasi Organisasi di Lingkungan Instansi Pemerintah, komunikasi horisontal adalah komunikasi yang berlangsung antara para pegawai atau bagian lain yang memiliki kedudukan yang setara. Komunikasi horisontal terdiri dari penyampaian pesan/informasi di antara rekan-rekan sejawat dalam unit kerja yang sama.

Dalam komunikasi horisontal, komunikasi tersebut biasanya terjadi dalam rapat komisi, interaksi pribadi, selama waktu istirahat, obrolan dalam telepon, memo dan catatan, kegiatan sosial dan lingkaran

kualitas. Lingkaran kualitas itu sendiri merupakan sebuah kelompok pekerja sukarela yang berbagi wilayah tanggung jawab. Komunikasi juga merupakan pengiriman dan penerimaan informasi dalam organisasi yang kompleks. Yang termasuk dalam bidang ini adalah komunikasi internal, hubungan manusia, hubungan persatuan pengelola, komunikasi downward atau komunikasi dari atasan kepada bawahan, komunikasi upward atau komunikasi dari bawahan kepada atasan, komunikasi horizontal atau komunikasi dari orang-orang yang sama level atau tingkatnya dalam organisasi, keterampilan berkomunikasi dan berbicara, mendengarkan, menulis dan komunikasi evaluasi program.

Mengenai fungsi komunikasi organisasi sebagai sumber informasi terlihat bahwa penyampaian informasi dari atasan kepada bawahan dan sebaliknya dilaksanakan dengan berbagai instrument yakni surat yang berisikan informasi resmi dari pimpinan kecamatan kepada kepala-kepala desa atau instansi lain di luar kecamatan, memo berisikan informasi resmi dari pimpinan kecamatan yang ditujukan hanya ke pegawai kantor kecamatan saja, dan juga diinformasikan secara langsung pada saat pertemuan rapat yang diadakan pada setiap minggu ataupun apabila ada kegiatan yang memerlukan kegiatan rapat, apel dilaksanakan setiap hari yang pada pelaksanaannya juga berisikan informasi, arahan dari pimpinan kepada pegawai kantor kecamatan dan pada pertemuan informal lainnya seperti pada kegiatan makan siang, minum sore. Untuk penggunaan media social internet belum di gunakan karena jaringan internet dan juga telepon di kecamatan tabukan selatan belum baik dan sering mengalami gangguan terutama terjadi jika ada pemadaman listrik.

Camat selaku pimpinan melaksanakan fungsi komunikasi tersebut dengan penyampaian yang baik dan dapat diterima oleh para bawahan, begitu juga dengan hubungan dengan pihak eksternal yang menggunakan media tersebut pada saat berbagi informasi yang contohnya pada saat penanganan covid-19 di Kecamatan Tabukan

Selatan.

## 2. Fungsi Regulatif

Untuk menghadapi era globalisasi yang penuh tantangan dan peluang, aparatur negara hendaknya memberikan pelayanan yang sebaikbaiknya, berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan penerima pelayanan. Secara khusus, pemerintah telah sadar akan pentingnya pemberian pelayanan publik karena pada hakikatnya masyarakat sebagai pemangku kepentingan memiliki hak untuk mendapat pelayanan terbaik. Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas dan prima secara terusmenerus dan berkelanjutan merupakan salah satu ciri tata kelola pemerintahan yang baik (good public governance). Komunikasi organisasi merupakan salah satu kegiatan reformasi birokrasi di bidang kehumasan dalam upaya mewujudkan tata kelola kehumasan yang baik menuju pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan penciptaan kesejahteraan masyarakat.

Secara khusus, pemerintah telah sadar akan pentingnya pemberian pelayanan publik karena pada hakikatnya masyarakat sebagai pemangku kepentingan memiliki hak untuk mendapat pelayanan terbaik. Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas dan prima secara terusmenerus dan berkelanjutan merupakan salah satu ciri tata kelola pemerintahan yang baik (good public governance).

Penekanan komunikasi organisasi di kecamatan tabukan selatan harus menjawab visi dan misi kepala daerah yakni bupati serta menjalankan perintah undang-undang pemerintahan daerah dan peraturan pemerintah tentang kecamatan yaitu menyelenggarakan tugas pemerintahan umum sesuai dengan baik. Untuk melaksanakan tugas pelayanan di kecamatan perlu dilakukan komunikasi organisasi secara intensif di dalam merumuskan kebijakan teknis guna pelaksanaan secara efektif dan efisien, sehingga program yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan sesuai rencana yang telah ditentukan.

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan para informan di kantor Kecamatan Tabukan Selatan, fungsi

komunikasi organisasi sebagai regeulatif terlihat bahwa selain dari komunikasi, komunikasi yang dilakukan dalam rangka menyelenggarakan tugas pemerintahan kecamatan melalui aturan yang berlaku yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Adapun tugas dan pokok fungsi kecamatan diatur dalam peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2018 tentang kecamatan, dari aturan tersebut terlihat bahwa kecamatan memiliki fungsinya dan juga terlihat ada struktur organisasi yang berdasarkan aturan sehingga pekerjaannya sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Kemudian dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan, terdapat juga Standart Operasi yang ditentukan oleh kecamatan untuk memperlancar penyelenggaraan tugas tersebut, selain itu aturan berlaku juga ditetapkan oleh camatan selaku pucuk pimpinan kecamatan dengan memperhatikan situasi dan kondisi wilayah dan pegawai.

## 3. Fungsi Integratif

Dalam lampiran Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2011, tentang Pedoman Umum Komunikasi Organisasi di Lingkungan Instansi Pemerintah, dijelaskan bahwa komunikasi ke bawah merupakan komunikasi ketika atasan mengirim pesan kepada bawahannya. Menurut Pace and Faules (2006: 184), komunikasi ke bawah dalam sebuah organisasi berarti bahwa informasi/pesan mengalir dari jabatan yang berotoritas lebih tinggi kepada mereka yang berotoritas lebih rendah. Pendapat lain dari Agus M. Hardjana (2003: 30) yang mengemukakan bahwa komunikasi ke bawah (downward communication) adalah komunikasi yang mengalir dari bagian atas lembaga ke bagian bawah lembaga yang dilakukan oleh pejabat (atasan) ke petugas bawah (bawahan), melalui rantai perintah resmi lembaga dari mata rantai paling atas ke mata rantai paling bawah.

Penerapan komunikasi organisasi Internal pada kantor kecamatan tabukan selatan, yaitu melalui komunikasi vertikal, horizontal, dan diagonal. Pada prinsipnya

# EKSEKUTIF

Volume 2 No. 4 Tahun 2022

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

komunikasi vertikal yang dilakukan pada kecamatan, yaitu Komunikasi antar pimpinan, unit kerja dan bawahan dalam bentuk pesan, perintah, teguran, dan solusi. Prinsip komunikasi yang diterapkan untuk komunikasi horisontal dilakukan antar pimpinan, unit kerja dan bawahan, dalam bentuk komunikasi berdasarkan kegiatan kerja yaitu masukan, pengolahan dan hasil kerja yang telah dikomunikasikan. Sedangkan prinsip yang diterapkan untuk komunikasi diagonal yaitu melakukan komunikasi yang melibatkan semua unsur organisasi untuk memecahkan permasalahan organisasi melalui komunikasi internal organisasi.

Penerapan fungsi integratif terlihat dari cara dari pimpinan kecamatan dalam membangun pola komunikasi dengan bawahan dan pihak stakeholder lainnya yang terdiri dari 2 bagian yakni informal dan formal, formal terlihat dengan pengadaan rapat koordinasi, pertemuan-pertemuan yang bersifat resmi dan diagendakan untuk melaksanakan koordinasi dan memantau perkembangan penyelenggaraan tugas pemerintahan kecamatan dan bagian informal terlihat dari pertemuan-pertemuan biasa pada saat istirahat atau bukan jam kerja yang didalamnya berisi informasi mengenai pekerjaan dan fungsinya dalam menjalankan pemerintahan kecamatan.

## Penutup

### Kesimpulan

1. Fungsi Informatif merupakan komunikasi dalam organisasi kecamatan tabukan selatan sebagai urat nadi dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, komunikasi yang dibangun selama ini untuk membangun hubungan dan membagi informasi antar bidang satu dengan bidang yang lain dan juga hubungan dengan pihak eksternal. Salah satu fungsi komunikasi organisasi adalah membagi informasi kepada pihak terkait. Di kecamatan tabukan selatan menggunakan berbagai media untuk berkomunikasi dan menyampaikan informasi seperti pertemuan langsung seperti rapat, apel dan juga melalui

telepnn dan media internet berbasis aplikasi.

2. Fungsi Regulatif merupakan salah satu bentuk komunikasi yang dapat dipahami oleh pegawai kantor kecamatan adalah dengan menggunakan regulasi atau aturan, komunikasi juga dapat tersampaikan melalui aturan yang berlaku, dengan adanya aturan, maka pegawai telah mengetahui apa yang harus dikerjakan seperti yang terjadi di kecamatan tabukan selatan dimana pegawai berpedoman pada peraturan pemerintah, SOP dan juga perintah tertulis oleh atasan.
3. Fungsi Integratif Pada prinsipnya di kecamatan tabukan selatan dilaksanakan dalam 2 bentuk yakni secara formal dan informal yakni melalui rapat resmi, apel dan juga pertemuan yang diagendakan oleh pimpinan kecamatan dan selanjutnya dapat juga melalui pertemuan informal namun berisi pesan mengenai tugas penyelenggaraan pemerintahan yang ada di kecamatan tabukan selatan.

### Saran

1. Untuk membagikan informasi yang maksimal, disarankan untuk membuat website yang ada dengan mengisinya konten-konten dari struktur organisasi dan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe agar serta Standar Operasional Prosedur pengurusan tiap layanan agar masyarakat mengetahui dan tidak salah dalam pengurusan, selain itu perlu diadakan sosialisasi lagi ke tingkat desa mengenai penggunaan website. Dalam website tersebut juga pegawai dapat mengakses dan melaporkan bentuk kegiatan yang dilaksanakan.
2. Demi menjaga komunikasi yang baik agar tidak terjadi *miss komunikasi*, maka Camat dapat memaksimalkan grup pegawai untuk berkomunikasi agar hal-hal yang harus diketahui oleh pegawai dengan mudah tersampaikan dengan merata.
3. Perlu perhatian dari seluruh pegawai Kecamatan Tabukan Selatan, untuk terus memperbaiki bentuk komunikasi

# EKSEKUTIF

Volume 2 No. 4 Tahun 2022

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

organisasi yang diterapkan baik secara internal maupun secara eksternal melalui peningkatan kemampuan jejaring organisasi di dalam menciptakan sebuah komunikasi yang efektif baik dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi.

## Daftar Pustaka

- Ahmadi, A dan Narbuka C. 2007. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Arnold. H. J. & Feldman D. 2006. *Individual Organization*. Newyork. McGraw Hills
- Cangara, Hafied. 2008. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta : Rajawali Pers
- Devito, Joseph A. 2011. *Komunikasi Antar Manusia*. Pamulang-Tangerang Selatan: Karisma Publishing Group
- Effendy O, 2004, *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Gunadi, YS. 2008. *Himpunan Istilah Komunikasi*. Jakarta : Grasindo.
- Lestari, G Endang dan Maliki. 2003. *Komunikasi yang Efektif*, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Liliweri A, 2004. *Wacana Komunikasi Organisasi*, Bandung: Mandar Maju,
- \_\_\_\_\_. 2011. *Komunikasi Serba Ada Serba Makna*. Jakarta: Kencana Prenana Media Group.
- Muhammad Arni. 2005. *Komunikasi Organisasi*. Jakarta: Bumi Aksara
- Mulyana Deddy. 2005. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: PT Remaja. Rosdakarya.
- Nawawi H. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis Kompetitif*. Yogyakarta. Gadjia Mada University Pres.
- Prastowo. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan*. Penelitian. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media
- Prawitasari. 2005. *Mengenal Emosi Melalui Komunikasi Non Verbal*. Buletin Psikologi. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM. Tahun III. No.1, hal. 27 - 43.
- Romli, Khomsahrial. 2011. *Komunikasi Organisasi Lengkap*. Jakarta: PT Grasindo.
- Roudhonah. 2007. *Ilmu Komunikasi*. Jakarta: UIN Jakarta Press
- Sendjaja, Sasa Djuarsa., 2002. *Pengantar Komunikasi*, Pusat Penerbitan Universitas Terbuka, Jakarta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. CV
- \_\_\_\_\_. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Tubbs, Stewart L. – Moss, Sylvia, 2005. *Human Communication: Konteks-Konteks Komunikasi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Wasistiono Sadu , Ismail Nurdin dan M. Fahrurosi 2009, *Perkembangan Organisasi Kecamatan, dari Masa ke masa*, Penerbit Fokus Media Jakarta.
- Wiryanto, 2005, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Jakarta: Grameia Wiiasarana Indonesia.

## Sumber Lainnya:

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan
- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 17 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja kecamatan dan kelurahan Kabupaten Kepulauan Sangihe